



**STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI
PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT
(Studi Kasus : Kawasan Agrowisata Bumiaji, Kota Batu
& Agropolitan Srimartani, Kabupaten Bantul)**

Mirza Permana

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka

email: permanamirza@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Rural areas deviate from various potential natural resources that have the potential to be developed. One of the concepts of rural area development that is often used is agro-politan. The achievement of strong and sustainable rural economic development through the concept of agropolitan and agrotourism is an effective form of cooperation between the community and the government in the utilization of existing resources. This study aims to analyze the level of participation, local institutions and the concept of integrated development of agropolitan areas in Srimartani Village and Agrotourism in Bumiaji Village. The level of community participation in the agropolitan area of Srimartani Village and the Agro-tourism Area of Bumiaji Village has reached the level of citizen power. This high level of participation is supported by the activeness of local institutions that have strength in trust, norms and networks so as to produce sustainable local institutions. Decisions on development plans that generate public interest must be made taking into account the values of the local community.

Kata Kunci: *Agropolitan, Local Institution, Participatory, Regional Development.*

Abstrak

Wilayah perdesaan menyimpang berbagai potensi sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan. Salah satu konsep pengembangan wilayah perdesaan yang sering digunakan adalah agropilitan. Tercapainya pembangunan ekonomi perdesaan yang kuat dan berkelanjutan melalui konsep agropolitan maupun agrowisata merupakan sebuah bentuk kerjasama yang efektif antara masyarakat dan pemerintah dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi, kelembagaan lokal dan konsep keterpaduan pengembangan kawasan agropolitan di Desa Srimartani dan Agrowisata di Desa Bumiaji. Tingkat partisipasi masyarakat pada kawasan agropolitan Desa Srimartani dan Kawasan Agrowisata Desa Bumiaji telah mencapai tataran citizen power. Tingkat partisipasi yang tinggi tersebut ditunjang dari keaktifan kelembagaan lokal yang memiliki kekuatan pada kepercayaan, norma dan jaringan sehingga menghasilkan kelembagaan lokal yang berkelanjutan (sustain). Keputusan tentang rencana pembangunan yang menghasilkan kepentingan umum harus dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Agropolitan, Kelembagaan Lokal, Partisipatif, Pengembangan Wilayah*

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari sistem manajemen, perencanaan memiliki peranan yang sangat besar. Rencana adalah kegiatan investasi untuk berubah ke keadaan yang lebih baik dari sekarang. Secara umum, perencanaan memiliki dua elemen kunci, pertama terkait dengan apa yang ingin dicapai dan kedua terkait bagaimana cara untuk mencapainya. Perencanaan harus selaras dengan kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan wilayah untuk pembangunan wilayah harus ditafsirkan dalam kinerja sosial budaya masyarakat yang sejalan dengan keberlanjutan ekologis.

Pembangunan daerah artinya upaya membentuk dan mengembangkan daerah sesuai pendekatan keruangan, dengan mencermati aspek sosial budaya, ekonomi, fisik, dan kelembagaan pada kerangka perencanaan serta pengelolaan pembangunan yang terpadu. Salah satu konsep pembangunan wilayah berbasis ekonomi adalah konsep pembangunan Kawasan agropolitan. Konsep ini muncul disebabkan adanya kesenjangan pembangunan wilayah antara kota sebagai pusat aktivitas dan perkembangan ekonomi serta wilayah pedesaan cuma sebagai pusat aktivitas pertanian yang belum tumbuh. Proses interaksi antara kedua wilayah tersebut sering kali melemahkan posisi kawasan pedesaan (*backwash effect*).

Pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan didukung dengan lahirnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.

Pembangunan kawasan agropolitan dilakukan guna meningkatkan taraf hidup penduduk pedesaan dengan mempercepat pembangunan di segala bidang serta mempererat konektivitas desa-kota. Hal ini dicapai melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis kerakyatan yang memiliki daya saing tinggi. Oleh karena itu,

pada tahap pengembangan kebijakan pertanian, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan, diperlukan kolaborasi antar *stakeholder* setempat untuk memastikan keberhasilan program kebijakan agropolitan yang sangat kompleks (Shaffril *et al.* 2010). Salah satu ciri kawasan agropolitan yang maju ditandai dengan masuknya industri pasca panen (pengolahan), perdagangan hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk aktivitas ekspor), perdagangan agribisnis hulu (fasilitas serta permodalan pertanian), agrowisata, serta aktivitas warga, termasuk jasa. Agrowisata didefinisikan sebagai suatu usaha yang dijalankan oleh para petani yang berada pada Kawasan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara menyajikan atraksi/kegiatan wisata alam yang diminati wisatawan. Agrowisata juga dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari *rural tourism* yang menawarkan kegiatan pertanian sebagai daya tarik wisata serta melibatkan penduduk lokal dalam perencanaan hingga pengelolaan kawasan agrowisata (Andini, 2013).

Pendekatan pembangunan desa dengan berpijak pada konsep agropolitan telah menjadi *trend* dewasa ini. Terdapat tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian dalam konteks pengembangan agropolitan: (1) akses terhadap lahan pertanian dan air, (2) devolusi politik dan wewenang administratif dari tingkat pusat ke tingkat lokal, dan (3) perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk pertanian (Pranoto, 2005).

Implementasi program pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia pada umumnya masih belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatannya kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian Rusastra *et al.* (2004) tentang evaluasi kinerja pelaksanaan program rintisan agropolitan di tiga kabupaten di Indonesia, yaitu Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Kabupaten Agam Sumatera Barat dan Kabupaten Barru Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa dalam hal pengembangan sarana dan prasarana fisik dinilai berhasil dengan baik, namun dalam hal

pengembangan SDM belum memberikan manfaat dan dampak optimal terhadap partisipasi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Mahardhani (2012) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik yang terjadi pada tataran bawah akan selalu dipengaruhi oleh adanya dukungan publik, keadaan sosial budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta komitmen dari pejabat pemerintah itu sendiri jika hal tersebut dapat dipenuhi dengan baik, maka dampak yang akan ditimbulkan dari proses implementasi tersebut juga akan menjadi baik dan sesuai dengan rencana. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perencanaan partisipatif adalah rasa memiliki dan kepedulian oleh masyarakat terhadap kelancaran pembangunan. Keputusan yang diambil akan lebih efektif karena masyarakat ikut urun rembuk atau sumbangsih pemikiran.

Sejalan dengan isu dan implementasi, konsep agropolitan maupun agrowisata, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menyusun strategi perencanaan wilayah khususnya dalam hal pembangunan kawasan agropolitan yang dapat menjembatani kebijakan pemerintah pada aras makro dan kepentingan masyarakat pada aras mikro.

2. RUMUSAN MASALAH

Sebagai bagian dari sistem manajemen, perencanaan memiliki peranan yang sangat besar. Sayangnya selama ini dalam tingkatan partisipasi, masyarakat hanya sebagai penerima informasi, belum terlibat penuh didalam penyusunan sebuah rencana. Perkembangan daya kritis dan tuntutan masyarakat menimbulkan kebutuhan adanya perencanaan program/kegiatan yang lebih bersifat partisipatif. Penyusunan dokumen rencana bisa jadi tidak keliru, realisasinya juga sudah selesai dan sesuai dengan target capaian yang ditetapkan, namun masyarakat saat ini lebih menginginkan kegiatan yang

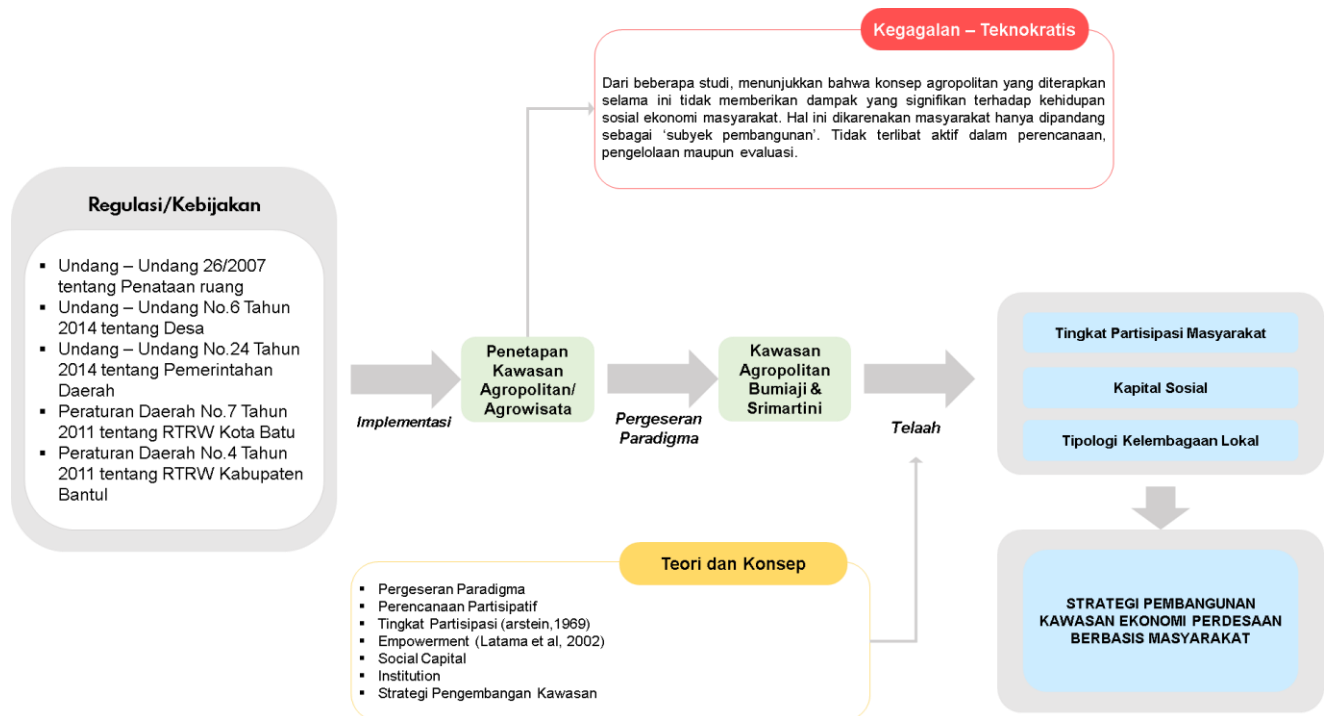
mampu mendatangkan manfaat secara merata dan berkesinambungan bukan sekedar dilaksanakan dan ternyata hanya menguntungkan segelintir orang semata. Keterpaduan program menjadi penting demi tercapainya cita-cita bersama dalam pembangunan kawasan agropolitan maupun agrowisata.

Keberadaan *local institution* perlu diperhatikan dan menjadi sumber kekuatan utama untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan. Posisi Lembaga local selama ini masih sebatas penyambung informasi kepada masyarakat. Kolaborasi dan *shareholder* (berbagi peran dan hasil) antara pemerintah dan Lembaga local belum optimal. Peran pemerintah lebih banyak kepada regulator dan sekaligus eksekutor. Hal ini tentu mengecilkan peran lembaga local sebagai ujung tombak pembangunan yang berbasis masyarakat pada lingkup mikro.

3. METODE PENELITIAN

Peranan perencanaan partisipatif dalam konteks pembangunan masyarakat dan wilayah dapat membantu meningkatkan peran aktif masyarakat dengan menyerap kebutuhan masyarakat, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk interaksi dan komunikasi, memperkuat manajemen organisasi yang baik sejalan dengan paradigma *people centered development*.

Metode penelitian yang digunakan adalah menghubungkan teori perencanaan partisipatif terhadap pengelolaan Kawasan agropolitan di Kota Batu dan Kabupaten Bantul. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara deskriptif. Data yang digunakan bersifat sekunder dari beberapa sumber. Penelitian ini menggunakan studi kasus agar dapat lebih riil dilihat bagaimana keterkaitan dan penerapannya secara langsung. Kerangka pemikiran dalam tulisan ini dapat dilihat lebih ringkas pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pikir Studi

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Agrowisata

Pembangunan desa salah satunya dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi lokalnya (Irma *et al.* 2017). Potensi tersebut dapat berupa pertanian maupun wisata. Keduanya memiliki maksud yang sama yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 poin (1) menjelaskan bahwa potensi ekonomi lokal desa menjadi syarat adanya pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Pembangunan desa yang sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki dapat dijadikan sebagai icon bagi desa tersebut.

Pembangunan suatu kawasan ekonomi di

perdesaan baik itu konsep agropolitan maupun agrowisata tidak akan berjalan dengan baik bila masyarakat lokal masih dipandang sebagai objek pembangunan. Peran serta masyarakat mutlak diperlukan dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Soemarto, 2009 dalam Satries, 2010).

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan yang ada di Desa Srimartini Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dan kawasan agrowisata di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu dapat dilihat dari tingkat partisipasi Sherry Arnstein (1969). Tabel 1 menunjukkan tingkatan partisipasi masyarakat di Desa Srimartani dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan dan masyarakat di Desa Bumiaji dalam pelaksanaan program agrowisata.

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat

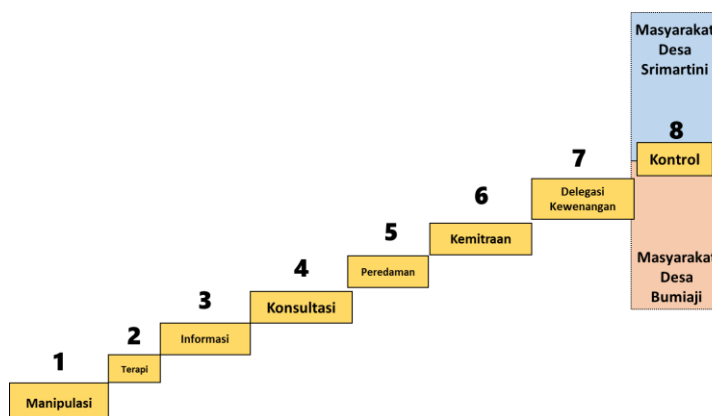
No	Variabel	Indikator	Fakta Lapangan	
			Desa Srimartini	Desa Bumiaji
1	Adanya Informasi mengenai rencana pengembangan	Manipulasi	√	√

No	Variabel	Indikator	Fakta Lapangan	
			Desa Srimartini	Desa Bumiaji
	Kawasan (Agropolitan & Agrowisata)			
2	Adanya Undangan Sosialisasi musyawarah mengenai pengembangan kawasan (Agropolitan & Agrowisata)	Terapi	√	√
3	Adanya sosialisasi jadwal musyawarah pengembangan kawasan	Informasi	√	√
4	Masyarakat dapat memberikan masukan/usulan secara langsung	Konsultasi	√	√
5	Adanya keberlanjutan dialog dengan masyarakat terkait pengembangan kawasan	Perujukan	√	√
6	Masyarakat dapat secara aktif mengawasi proses pengembangan kawasan	Kerjasama	√	√
7	Masyarakat diberikan ruang untuk terlibat dalam perumusan program pengembangan kawasan	Pelimpahan Kekuasaan	√	√
8	Masyarakat diberikan wewenang untuk turut terlibat dalam pengawasan pengembangan kawasan	Kontrol Masyarakat	√	√

Sumber: Arnstein (1969) dimodifikasi

Dari tabel 1 terlihat bahwa tingkatan partisipasi masyarakat di kawasan agropolitan Srimartini dan kawasan agrowisata Bumiaji sudah berada pada tataran *citizen power*. Hal ini diperoleh dari *deep study* terhadap artikel yang mengulas tentang partisipasi dan pemberdayaan di Desa Srimartani dan Desa Bumiaji. *Deep study* diperkuat dengan berbagai teori yang relevan dalam hal pembangunan berbasis masyarakat. Semakin tinggi tangga menunjukkan tingkatan partisipasi yang semakin baik. *Citizen power* mengandung elemen partisipasi tertinggi yaitu kerjasama, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol masyarakat sebagaimana tersaji pada Gambar 2.

Bila partisipasi warga bisa berjalan dengan baik maka program- program pemberdayaan juga akan berjalan dengan baik sebab pada dasarnya partisipasi merupakan kunci dari pemberdayaan (*The empowerment is road to participation*). Pemberdayaan warga ialah langkah buat mengikutsertakan warga dalam pembangunan nasional dengan mengaitkan mereka dalam segala proses, keahlian analisis serta perencanaan pembangunan yang dimulai dari tempat tinggal mereka. Partisipasi warga menampilkan bagaimana redistribusi kekuasaan yang adil bekerja (*redistribution of power*) antara penyedia aktivitas serta kelompok penerima aktivitas. Menurut Latama *et al* (2008), pemberdayaan memiliki lima karakteristik, yaitu berbasis lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, berbasis kemitraan, bersifat holistik dan berkelanjutan. Matriks analisa indikator pemberdayaan di kawasan agropolitan Srimartani dan Agrowisata Bumiaji dapat dilihat pada Tabel 2.



Gambar 2 Tingkat Partisipasi berdasarkan Tingkat Kewenangan

Tabel 2 Matriks Analisis Indikator Pemberdayaan

No	Indikator Pemberdayaan	Analisa	
		Kawasan Agropolitan Srimartani	Kawasan Agrowisata Bumiaji
1	Berbasis Lokal	Pelaksanaan program pengembangan Kawasan agropolitan di Desa Srimaltani, difokuskan pada pengembangan kelompok/organisasi tani terpadu melalui pelaksanaan program dan pelatihan berbasis pemberdayaan masyarakat petani.	Pengembangan kawasan Agrowisata Bumiaji merupakan inisiasi masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani. Potensi unggulan yang menjadi komoditi wisata antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata petik apel, jeruk, jambu kristal ▪ Wisata petik bunga ▪ Peternakan kambing etawa dan ▪ UMKM
2	Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan	Pendapatan rumah tangga masyarakat di Desa Srimartani mengalami peningkatan karena bertambahnya sumber penghasilan pasca berjalannya program pengembangan kawasan agropolitan. Terjadi peningkatan pada kepemilikan hewan ternak dan budidaya ikan air tawar, mengingat dua peternakan tersebut merupakan salah satu program unggulan yang di kembangkan di Desa Srimartani	Mayoritas mata pencaharian di Desa Bumiaji adalah petani dengan lahan milik perorangan. Dengan lahan yang ada mereka tanami buah, sayur, dan bunga yang dimanfaatkan untuk kegiatan agrowisata. Potensi agrowisata yang dikembangkan di Desa Bumiaji memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan perluasan tenaga kerja. Pemerintah desa Bumiaji hanya melaksanakan peran koordinator dan fasilitator. Sedangkan peran <i>entrepreneur</i> justru lebih banyak dilakukan oleh masyarakat lokal khususnya pemilik potensi agrowisata.
3	Berbasis kemitraan	Pengembangan kawasan agropolitan di Desa Srimartini bekerjasama dengan pihak BAZNAS. Pihak BAZNAS telah memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat perencanaan program terkait pengembangan kawasan agropolitan karena program ini akan mengakomodasi semua kepentingan masyarakat terutama yang tergabung	Pengembangan agrowisata di Desa Bumiaji dapat tercapai berkat kolaborasi antara pemerintah Kota Batu, masyarakat dan Swasta. Sektor swasta yang ada di Bumiaji yakni <i>Apple Sun Learning Center</i> . Bentuk kerjasama yang dijalin Desa Bumiaji dengan sektor swasta yakni <i>Apple Sun</i> hanya sebatas penyambung tamu yang datang ke <i>apple sun</i> jika ingin berwisata

No	Indikator Pernerdayaan	Analisa	
		Kawasan Agropolitan Srimartani	Kawasan Agrowisata Bumiaji
		didalam kelompok tani.	petik baik itu petik apel, jeruk, jambu maupun bunga maka pihak <i>apple sun</i> akan membawa pengunjung ke potensi agrowisata Bumiaji sesuai keinginan tamu yang bersangkutan.
4	Bersifat holistik	Pengembangan kawasan telah berpijak pada prinsip keberlanjutan yang mengakomodir aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Masyarakat memiliki peran penuh dalam pengelolaan kawasan.	Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, masyarakat Desa Bumiaji memiliki peran besar. Keseluruhan aspek telah dipertimbangkan sehingga keberlanjutan program agrowisata di Desa Bumiaji dapat tercapai.
5	Berkelanjutan	Kelembagaan lokal yang ada di masyarakat Desa Srimartani telah mampu menjaga khasanah budaya dan kelestarian alam sehingga mampu menjadikan desa mereka sebagai Desa Agropolitan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Pelaku wisata dan kelompok tani merupakan pelaku utama dalam pembangunan agrowisata. Hal ini dilakukan dalam membuka lapangan pekerjaan, menaikkan pendapatan masyarakat serta berperan dalam mendukung jumlah pengunjung atau wisatawan ke agrowisata Bumiaji. Beberapa kelompok yang berperan penting dalam pembangunan agrowisata ini adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Wisata Bukit Apek (WBA).

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pernerdayaan telah berjalan di dua kawasan yang menjadi fokus studi ini, yakni kawasan agropolitan Srimartani dan kawasan agrowisata Bumiaji. Masyarakat memiliki kekuatan untuk merencanakan dan mengatur kawasan mereka atau dengan kata lain “*powerfull*” sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Pemerintah telah menjalankan peran dengan baik sebagai regulator, fasilitator yang mengakomodir keinginan masyarakat. Kekuatan yang

dimiliki masyarakat merupakan kunci konsep untuk mendalami proses pernerdayaan. Andriany (2015) menyatakan bahwa pernerdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.



Keterangan :

- A. Kawasan Agropolitan Bumiaji
- B. Kawasan Agropolitan Srimartani

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 3 Pernerdayaan Masyarakat di Kawasan Agropolitan Bumiaji dan Srimartini

4.2 Peran Modal Sosial Sebagai Pendorong Peran Serta Kelembagaan Lokal Dalam Pengembangan Kawasan

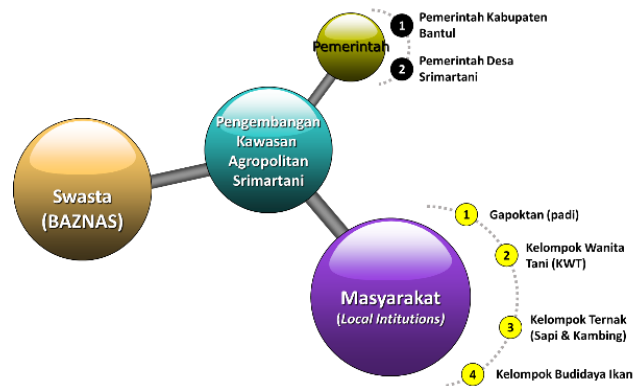
Interaksi antar *stakeholders* di kawasan agropolitan dapat dijelaskan melalui konsep proses sosial. Menurut Soekanto (1982), proses sosial adalah cara hubungan yang muncul ketika individu dan kelompok sosial bertemu dan menentukan sistem dan bentuk dari hubungan tersebut.

Karakteristik Desa Srimartani dan Desa Bumiaji sama – sama merupakan Desa pertanian. Kedua desa tersebut memiliki sistem kelembagaan lokal yang cukup kuat. Masyarakat di Desa Srimartani secara keseluruhan tergabung dalam kelompok pengembangan Kawasan agropolitan, mulai dari kelompok tani padi, kelompok pemeliharaan sapi dan kambing, kelompok pembudidaya ikan, sampai dengan kelompok perempuan tani khususnya untuk ibu-ibu petani.

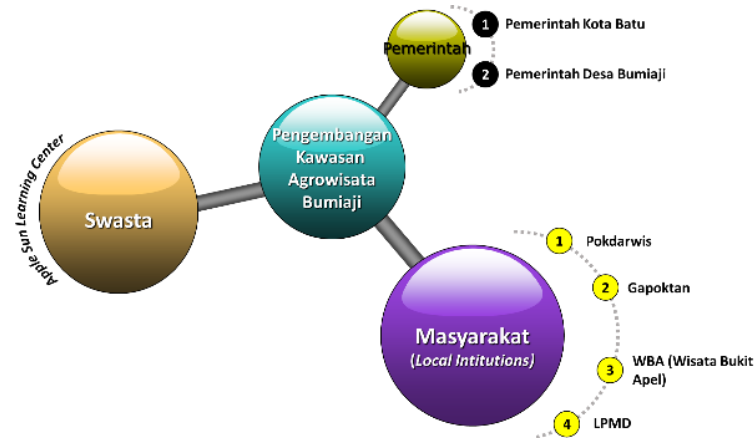
Keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan Desa Srimartani dan Agrowisata

Desa Bumiaji tidak terlepas dari peran aktif kelembagaan lokal. Pendekatan kelembagaan dalam rencana desentralisasi pembangunan daerah digunakan sebagai alat atau metode untuk mencapai partisipasi sebanyak mungkin pemangku kepentingan (partisipasi tinggi) dan memandu pengambilan keputusan bersama, sehingga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan agrowisata di Desa Bumiaji mengutamakan kearifan local yang telah mengakar di masyarakat setempat. Kelompok tani merupakan pemain kunci dalam pengembangan agrowisata. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan berperan dalam meningkatkan jumlah pengunjung dan wisatawan. Beberapa kelompok yang berperan penting dalam pembangunan agrowisata ini adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Wisata Bukit Apel (WBA). Sinergitas pengembangan kawasan agropolitan Srimartani dan kawasan agrowisata Bumiaji tersaji pada Gambar 4 dan Gambar 5.



Gambar 4 Sinergitas Pengembangan Kawasan Agropolitan Desa Srimartani



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 5 Sinergitas Pengembangan Kawasan Agrowisata Desa Bumiaji

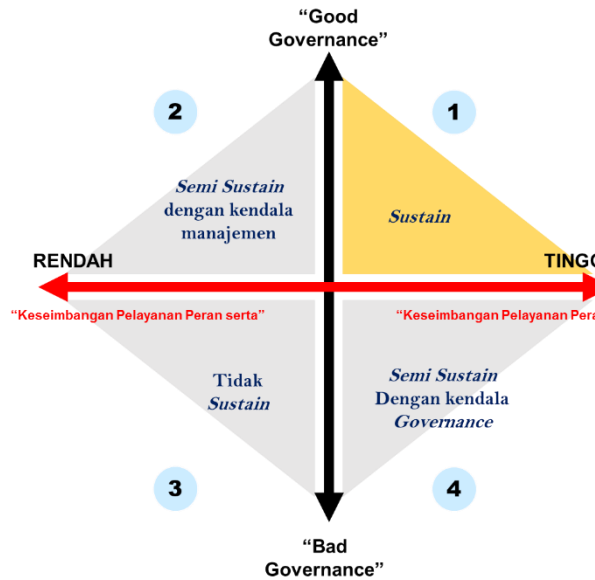
Modal sosial dalam perencanaan bersifat timbal balik. Interaksi antara perencana dan masyarakat sangat diperlukan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan rasional. Ini sangat penting ketika merencanakan rasionalitas komunikatif (pembelajaran interaktif/sosial). Modal sosial muncul dari interaksi antar partisipan yang memuat kepercayaan, kehadiran jaringan, dan kemudahan kolaborasi. Inilah yang tercermin dalam pengelolaan kawasan agropolitan di Desa Bumiaji dan Desa Srimartani. Kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat meliputi *trust*, *norms*, dan *networking*. Ketiga unsur tersebut sangat menopang keberhasilan pembangunan ekonomi kawasan. Subdimensi jejaring dalam suatu komunitas atau kelompok, menurut Putnam dalam Vipriyanti, (2011) yang menyatakan bahwa meluasnya keanggotaan di suatu organisasi menunjukkan hubungan yang meluas secara positif yang berkaitan dengan kohesi sosial (*social cohesion*), dalam hubungan timbal balik dan rasa percaya.

Berbagai kelompok yang ada di Desa Srimartani dan Desa Bumiaji berisikan unsur – unsur yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Keragaman elemen ini melengkapi jaringan kerjasama antar kelompok yang *concern* terhadap pengembangan agropolitan dan agrowisata untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk modal

sosial ini yang merupakan bentuk modern dari suatu kelompok, asosiasi, atau masyarakat, dan dikenal dengan istilah *bridging social capital*. Keberagaman anggota setiap kelompok di Desa Srimartani dan Bumiaji menciptakan sikap *outward looking* yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan jaringan yang saling menguntungkan dengan asosiasi dan kelompok di luar kelompoknya.

4.3 Tipologi Kelembagaan Lokal Dalam Rangka Menunjang Keberlanjutan Kawasan

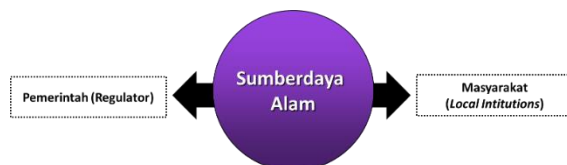
Bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan (*Good Governance*) peran pemerintah Kota Batu dan Kabupaten Bantul telah menunjukkan hal yang positif. Masyarakat beserta kelembagaan lokalnya yang lebih banyak berperan dalam menjaga eksistensi kawasan, baik dari segi sosial, lingkungan maupun ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kelembagaan lokal telah '*sustain*'.



Gambar 6 Tipologi Kelembagaan di Kawasan Agrowisata Desa Bumiaji dan Desa Srimartini

4.4 Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Melalui Pendekatan Perencanaan Wilayah Partisipatif

Pembangunan wilayah tidak dapat direalisasikan tanpa adanya perubahan – perubahan organisasi sosial dan sistem nilai, karena produktivitas dari suatu sistem ekonomi dan pengelolaan sumberdaya dikondisikan oleh budaya dan kelembagaan yang ada di masyarakat (Hayami, 2000). Mengembangkan ekonomi pedesaan yang kuat dan berkelanjutan merupakan kerjasama yang efektif antara pemanfaatan sumber daya yang ada, masyarakat lokal dan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai regulator memainkan peran strategis dalam mencari peluang penuh bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada semua kegiatan ekonomi.



Gambar 7 Konsep Sinergitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pendekatan *bottom up* yang diterapkan di dua kawasan yakni Kawasan Agropolitan Srimartani dan Kawasan Agrowisata Bumiaji telah menunjukkan suatu keberhasilan program yang selama ini selalu dilakukan dengan pendekatan teknokratis. Dengan menempatkan masyarakat sebagai ‘subyek’ pembangunan, maka masyarakat akan lebih merasa memiliki program dan meningkatkan rasa tanggung jawab demi tercapainya keberhasilan program. Model perencanaan partisipatif menjadikan masyarakat sebagai aktor kunci dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi rencana berjalan di wilayahnya.

Nikijuluw (1994) dalam Zamani dan Darmawan (2000) berpendapat pengelolaan berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan pengelolaan alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolanya. Ditambah adanya transfer diantara generasi yang menjadikan pengelolaan secara berkesinambungan. Cara ini merupakan yang paling efektif dibanding cara yang lainnya. Namun, masyarakat juga jangan sampai dilepaskan sendirian untuk mengelola semuanya. Ketidakmerataan tingkat pendidikan masyarakat yang berimplikasi pada kualitas sumberdaya manusia di Indonesia menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan potensi sumber daya yang ada. Salah satu hal yang bisa dilakukan dengan melibatkan pemerintah lokal dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada. Dari hasil telaah kajian partisipatif dalam pengembangan kawasan agropolitan di Desa Bumiaji dan Desa Srimartini, ada beberapa strategi pengembangan kawasan ekonomi perdesaan berbasis pertanian yang dapat dicontoh seperti :

1. Klasterisasi wilayah agropolitan sebagai suatu sistem jaringan
Jaringan harus dimaknai sebagai jaringan fisik, sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lokal. Dari dua kasus pertama yang telah ditelaah dan disajikan, dapat dilihat bahwa pembangunan fisik baru menciptakan kemampuan jaringan ketika penduduk Kawasan agropolitan memiliki perasaan kesatuan antar mereka.

2. Mengedepankan modal sosial sebagai penopang keberlanjutan program
 Konsep agropolitan menekankan pada kemandirian wilayah. Upaya kemandirian ini dapat diwujudkan melalui penggunaan sebanyak mungkin sumberdaya lokal. Salah satu bentuk sumberdaya lokal yang mampu mengangkat eksistensi kawasan adalah modal sosial. Modal sosial seperti yang tampak pada kawasan agropolitan Desa Bumiaji dan Desa Srimartini menunjukkan hubungan-hubungan yang selama ini mengikat antar warga. Hubungan sosial yang penting ialah hubungan kekerabatan, lingkungan, pernikahan, dan keterikatan dalam hubungan yang mempengaruhi penggunaan sumber daya yang sama.. *Trust* (kepercayaan) dibangun melalui kegiatan yang menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan kawasan. Jejaring sosial yang dibangun antar kelembagaan lokal telah memberikan ruang bagi partisipasi, pembelajaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kawasan. Sementara norma yang telah tertanam dalam keseharian menimbulkan solidaritas dan hubungan timbal balik antara sesama anggota.
3. Kebijakan intervensi pasar untuk kepentingan masyarakat desa
 Pemerintah selaku regulator memiliki tanggung jawab terhadap penambahan nilai tambah yang tidak keluar dari kawasan. Untuk itu diperlukan adanya intervensi pasar. Intervensi diarahkan untuk menjaga agar keuntungan tetap dirasakan oleh masyarakat desa sebagai pemanfaat dari program agropolitan. Perlu ditekankan bahwa intervensi terhadap ekonomi pasar diarahkan untuk mewujudkan dan mengembangkan agroindustri berbasis komunitas lokal. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperharikan, seperti :
 - Intervensi yang memungkinkan masyarakat desa memiliki akses ke lembaga permodalan formal;
 - Pembentukan lembaga *future trading* untuk mengurangi belenggu tengkulak dan menaikkan harga jual komoditas pertanian yang diusahakan masyarakat.
4. Keterkaitan antar *stakeholders*
 Musyawarah antar pelaku di dalam kawasan agropolitan sangat penting guna menumbuhkan perasaan atau ikatan yang kuat antar lembaga. Pendekatan ini dapat ditempuh melalui pola-pola kerjasama sebagaimana yang ditunjukkan oleh kelembagaan lokal yang ada di kawasan agropolitan Desa Bumiaji dan Srimartini. Keterkaitan antar pelaku dalam kawasan agropolitan dapat dipandang sebagai *imagined community*, yang membutuhkan pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas masalah, menyelesaikan masalah dan merencanakan pembangunan wilayah selanjutnya.
5. Masyarakat sebagai subyek pembangunan
 Pemberdayaan masyarakat desa menjadi ciri utama yang harus ada dalam pengembangan kawasan agropolitan. Tata kelola *bottom-up* mendukung transparansi untuk meningkatkan efisiensi proyek pembangunan daerah dan memastikan keberlanjutan program yang menjadi basis gerakan masyarakat partisipatif..

 Model partisipatif skala besar (termasuk masyarakat luas) cocok untuk proyek yang melibatkan kepentingan publik atau pengembangan masyarakat. Model keterlibatan terbatas, di sisi lain, dapat diterapkan pada perencanaan strategis, yang melibatkan pengidentifikasian dan penetapan kebijakan yang memerlukan pemikiran dan prioritas yang visioner.

 Keputusan tentang rencana pembangunan yang menghasilkan kepentingan umum harus dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat setempat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diamanahkan dalam Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* dan *bottom-up*, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari ulasan dua kasus yang terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan dan agrowisata, terlihat bahwa strategi pembangunan kawasan yang menitiknakan ekonomi perdesaan dapat tercapai dengan penguatan pada tingkat partisipasi masyarakat, mengutamakan kapital social yang ada dan terwadahi dalam suatu kelembagaan local yang baik.

Tingkat partisipasi masyarakat pada kawasan agropolitan Desa Srimartani dan Kawasan Agrowisata Desa Bumiaji telah mencapai tataran *citizen power*. Pada tingkatan ini menunjukkan tingkat partisipasi tertinggi yaitu kerjasama, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol masyarakat. partisipasi adalah kunci dari pemberdayaan. Dari dua kasus yang dibahas terlihat bahwa semua indikator pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Srimartani dan Desa Bumiaji meliputi *trust, norms, dan networking*. Berbagai kelompok yang ada di Desa Srimartani dan Desa Bumiaji berisikan unsur – unsur yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Keberagaman unsur tersebut menambah luas jaringan kerjasama kelompok – kelompok yang *concern* terhadap pengembangan agropolitan dan agrowisata dengan kelompok lain dalam mencapai tujuan bersama. Bentuk modal sosial inilah yang merupakan bentuk modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi atau masyarakat disebut dengan Modal Sosial Yang Menjembatani (*Bridging Social Capital*).

Mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan (*Good Governance*) peran pemerintah Kota Batu dan Kabupaten Bantul telah menunjukkan hal yang positif. Masyarakat beserta kelembagaan lokalnya yang lebih banyak berperan dalam menjaga eksistensi kawasan, baik dari segi sosial, lingkungan maupun ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kelembagaan lokal telah '*sustain*'.

Perencanaan wilayah melalui konsep pengembangan kawasan yang konvensional telah menunjukkan kegagalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada kasus agropolitan Desa Srimartani di Kabupaten Bantul dan Agrowisata Desa Bumiaji di Kota Batu, bahwa perencanaan dan pengembangan wilayah sebaiknya dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan *bottom up* yang diterapkan di dua kawasan yakni Kawasan Agropolitan Srimartani dan Kawasan Agrowisata Bumiaji telah menunjukkan suatu keberhasilan program yang selama ini selalu dilakukan dengan pendekatan teknokratis. Dengan menempatkan masyarakat sebagai 'subyek' pembangunan, maka masyarakat akan lebih merasa memiliki program dan meningkatkan rasa tanggung jawab demi tercapainya keberhasilan program. Perencanaan model partisipatif menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penyusunan, implementasi dan evaluasi perencanaan wilayahnya.

5. REFERENSI

- Andini N. 2013. Pengorganisasian Komunitas dalam Pengembangan Agrowisata di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangrum Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 24(3):173-188.
- Andriany D. 2015. Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA), 31-40. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Arnstein S. 1969. *A Ladder of Citizen Participation* Vol. 35 No. 4, hh. 216-224.
- Hayami. 2000. *Development Economics. From the Poverty to the Wealth of Nation*. Oxford University (UK): Press.
- Irma FU, Andi S, Alfiyatur R. 2017. Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2 (1): 46 – 64.
- Latama G, Wantasen A, Utiah A, Desniarti, Dinarwan, Indra, Rimper

- J, Sinjal H, Umar NA, Darwisito S, Arifin T, & Paongan Y. 2008. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Indonesia*. Sumber :<http://walhijabar.wordpress.com/2008/01/10/pengelolaan-wilayah-pesisir-berbasis-masyarakat-di-indonesia/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2022
- Mahardhani AJ. 2012. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Sendang Kabupaten Tulungagung. *Jejaring Administrasi Publik* II (8): 125 – 130.
- Mazdalifa AF, Islamy MI, Putra F. 2016. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Administrasi Publik* 1 (3): 18 – 26.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta (ID) : Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta (ID) : Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta (ID) : Sekretariat Negara
- Pranoto, S. 2005. *Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan melalui Model Pengembangan Agropolitan*. Disertasi. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rusastra. IW, Hendiarto, Khairina MN, Ade Supriatna, Wahyuning KS, dan Deri Hidayat. 2004. *Kinerja dan Perspektif Pengembangan Model Agropolitan dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Agribisnis*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Satries W, Ishardianto. 2011, Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang. *Jurnal Keybernian* 2 (2): 90, 94, 99
- Soekanto. S. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta (ID): Rajawali Press
- Shaffril, H. A. M., Nasir, A. F. A., Idris, K., Uli, J., & D'Silva, J. L. 2010. Agriculture project as an economic development tool to boost socio-economic level of the poor community: The case of agropolitan project in Malaysia. *African Journal of Business Management*, 4(11), 2354-2361.
- Vipriyanti. 2011. *Modal Sosial Dalam Pembangunan Wilayah*. Universitas Brawijaya-Press.
- Zamani, N.P dan Darmawan, 2000. *Pengelolaan Sumber daya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*. Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 21 – 26 Februari 2000. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB, Bogor.